

Resensi 1

TEOLOGI PUBLIK DAN KETIDAKADILAN PEMBEBASAN HOLISTIS BAGI DAN BERSAMA PARA KORBAN

Geovanius Wilson Parassa¹, Yunisa Salo Pongdatu²

Banawiratma, J.B. (peny.). *Teologi Publik dan Ketidakadilan: Pembebasan Holistik bagi dan Bersama Para Korban*. Jakarta: Jakarta BPK Gunung Mulia, 2023.



Penyunting : J. B. Banawiratma
Judul : Teologi Publik dan Ketidakadilan
Sub Judul : Pembebasan Holistik bagi dan Bersama Para Korban
Tempat : Jakarta
Penerbit : BPK Gunung Mulia
Tahun Terbit : 2023
Tebal : 136 halaman
ISBN : 9786234151022

Teologi Publik dan Ketidakadilan: Pembebasan Holistik Bagi dan Bersama Para Korban

Teologi publik merupakan sebuah diskursus teologis yang berkembang sebagai respon terhadap kompleksitas permasalahan

¹ Mahasiswa STFT INTIM di Makassar Program Studi Pascasarjana.

² Mahasiswa STFT INTIM di Makassar Program Studi Pascasarjana.

sosial-kemasyarakatan kontemporer. Dalam pandangan BJ Banawiratma, teologi publik tidak hanya berkuat pada tataran teoritis semata, melainkan harus mampu menjadi instrumen pemaaf yang holistik bagi para korban ketidakadilan struktural. Pendekatan ini pentingnya dialog interdisipliner antara wacana teologis dengan berbagai bidang keilmuan lain seperti sosiologi, antropologi, dan ilmu politik untuk menghasilkan analisis yang komprehensif terhadap akar permasalahan ketidakadilan.

Dalam konteks komunikasi holistik, teologi publik yang digagas Banawiratma menggarisbawahi urgensi keterlibatan aktif dalam perjuangan melawan berbagai bentuk persamaan dan marginalisasi. Paradigma ini tidak hanya memposisikan para korban sebagai objek pembahasan teologis, tetapi menempatkan mereka sebagai subjek yang memiliki agency dalam proses transformasi sosial. Melalui pendekatan partisipatif ini, teologi publik berupaya membangun kesadaran kritis sekaligus memberikan ruang bagi suara-suara yang selama ini terpinggirkan untuk ikut serta dalam diskursus dan aksi pencerahan yang bersifat transformatif

GAGASAN PENULIS

Solidaritas dalam Meraih Keadilan oleh *Surya Samudera Giamsjah*

Tiga tulisan secara berurutan dari buku ini memperlihatkan aktivitas ekspansi korporat yang menelan hak-hak masyarakat setempat. Pengambilan secara paksa, janji korporat yang tidak terlaksana yang menyatakan akan mengembalikan kerugian yang dialami masyarakat, dan bahkan intimidasi disuguhkan dalam buku ini. Salah satu persoalan dilematis yang dialami masyarakat setempat adalah ternyata pemerintah dan oknum korporat telah bekerja sama demi pemenuhan kepentingan mereka masing-masing. Padahal pemerintah setempat harusnya menjadi jawaban atas penajahan perusahaan yang berdampak masif terhadap

pola aktivitas masyarakat setempat setiap harinya. Fenomena ini memicu rasa kekecewaan serta kemarahan korban untuk menegakkan hak-hak mereka yang telah dirampas.

Para korban tidak tinggal diam atas peristiwa ini. Tokoh-tokoh masyarakat seperti tokoh adat, dan pemuka agama saling membawa kegelisahan yang sama akibat aktivitas korporasi yang semena-mena. Dalam tulisan Surya Samudera Giamsjah misalnya, ia memimpin orasi di dengan membawa keluhan warga karena adanya rencana pembangunan pabrik semen di salah satu daerah di Semarang, Jawa Tengah. Harapan Surya adalah memohon agar izin pembangunan dan pengoprasian pabrik semen tersebut dapat dihentikan. Setelah memimpin orasi tersebut, mereka yang hadir berdoa bersama dengan kepercayaan mereka masing-masing, Surya waktu itu mengangkat doa syafaat demi usaha-usaha pelestarian lingkungan dan berharap bahwa pemerintah merasakan hal yang dirasakan para korban agar terbuka pintu hatinya untuk membatalkan perancangan pabrik tersebut. Para tokoh masyarakat yang ikut terlibat dalam aksi bela rasa memutuskan untuk melakukan orasi sekali lagi. Masyarakat adat menunjukkan bela rasa mereka dengan cara melakukan ritus adat yang dinamakan *Brokohan*. Ritual itu dilakukan dengan cara menyanyikan nyanyian lirih bersyair "*Ibu Bumi wis dilarani...*" (ibu bumi sudah sakit) dan dinyanyikan di depan kantor gubernur Jawa Tengah.

Dalam tulisan nya, Surya bukan hanya menekankan hak-hak masyarakat, tetapi juga keutuhan alam. Surya menegaskan bahwa kekayaan alam yang dipandang dari perspektif '*ego*' akan melahirkan jiwa eksploitatif dan juga sebagai ajang pemenuhan kepentingan oknum. Perspektif '*ego*' ini menandakan sikap kolonial atau pemahaman Barat dalam memandang alam yang memang sebagai objek. Kekayaan alam jika dipandang dari perspektif '*eco*' maka manusia akan bijaksana dan memandang alam sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan.

Pemahaman orang Timur yang memandang alam sebagai bagian dari kosmologi kehidupan manusia didorong oleh jiwa kearifan lokal. Itulah sebabnya banyak tokoh adat yang juga turun terlibat dalam aksi bela rasa untuk menunjukkan keberpihakan mereka terhadap korban penindasan bukan hanya manusia tetapi juga kepada alam.

Hadir Bersama Petani Korban: Ketakutan itu Tidak Menguasainya oleh Sugianto

Hal sama juga terjadi dengan Sugianto yang kala itu memperjuangkan hak bersama masyarakat dan anggota Serikat Tani Korban Gusuran BNIL (STKGB). Serikat Tani Korban Gusuran BNIL adalah korban gusuran paksa karena adanya politisasi sengketa tanah yang dialami masyarakat sekitar oleh perusahaan PT BNIL.³ Singkat cerita, pada tanggal 8 September 2018 terjadi konflik antara PT BNIL dan SKTGB yang berawal dari provokasi perusahaan kepada STKGB. Keesokan harinya pihak kepolisian datang dengan sebuah helikopter untuk mengamankan lokasi kronologi. Lalu sekitar pukul 17.00, petani yang berkemah di lahan yang disengketakan diusir paksa tanpa ada perlawanan oleh pihak kepolisian menggunakan fasilitas keamanan. Beberapa anggota STKGB ditangkap dan Sugianto ditetapkan sebagai saksi atas kawan-kawannya yang sudah ditangkap.

Sugianto meyakini bahwa penetapannya sebagai tersangka hanyalah peralihan atau trik. Dan pada tanggal 11 Oktober 2018, Sugianto yang saat itu bersama dengan STKGB yang sedang melanjutkan perjuangan STKGB ditangkap polisi. Setelah ditangkap, rekan-rekan STKGB bersepakat untuk memper-

³ PT. Bangun Nusa Indah Lampung (PT. BNIL) adalah perusahaan agro kelapa sawit. PT. BNIL menggusur masyarakat sekitar yang tinggal dekat perusahaan demi ekspansi lahan industri tersebut. Setelah diusir dari desa yang dibangun dan ditinggalinya, mereka dipaksa menyerahkan jatah lahan plasma yang menjadi hak mereka kepada perusahaan inti BNIL. Korban gusuran akhirnya menyatukan suara mereka untuk mengorganisasikan orang-orang demi pemenuhan hak warga lokal yang dirampas oleh industri PT. BNIL dan membentuk STKGB.

juangkan Sugianto dan kawan-kawan petani yang ditangkap. Akibatnya, usaha untuk mendapatkan kembali hak plasma seolah-olah telah dilupakan. Perjuangan Sugianto demi membela hak masyarakat STKGB. Beberapa pendeta kaget mendengar kabar Sugianto yang saat itu sedang dalam jeruji. Salah seorang pendeta senior mengunjungi Sugianto. Dia dinasihati agar tidak usah “aneh-aneh”, dan fokus saja pada pelayanan. Bahkan anggota kepolisian pun heran dengan aksi Sugianto, seorang pendeta, mendampingi masyarakat yang bukan umatnya, yang masalahnya bukan keagamaan atau rohani. Kepolisian juga meragukan kompetensi dan kredibilitas Sugianto sebagai seorang pejuang hak STKGB dan mendampingi masyarakat Bujuk Agung dan Agung Jaya yang berkonflik dengan BNIL.

Pandangan masyarakat dan narasi dari beberapa anggota polisi merupakan pandangan umum tentang figur seorang pendeta yang hanya berurusan dengan tata ibadah dan pelayanan mimbar dalam persekutuan ibadah seolah ada gap pemisah antara urusan persoalan duniawi dan urusan rohani. Manusia selalu berbicara mengenai Kerajaan Allah dan berusaha untuk masuk ke dalamnya kelak, padahal Kerajaan Allah harus diwujudkan di dunia ini dan membawa *shalom* di tengah-tengah umat manusia. Jiwa profetik dan transformatif yang dimiliki oleh Sugianto adalah panggilanannya untuk mewujudkan Kerajaan Allah di dunia ini.

Gerakan Perempuan Poso: Merajut Damai, Membarui Desa, Merawat Bumi oleh Lian Gogali

Kemudian ada Lian Gogali yang menuliskan kisahnya tentang situasi di Poso yang marak konflik. Gogali sering mendapatkan pertanyaan mengenai daerah Poso untuk menjelaskan situasi dan pengalaman dirinya ataupun orang lain yang berasal atau tinggal di Poso. Poso seolah-olah sudah menjadi interpretasi dari kata konflik, teroris, pembunuhan dan penembakan. Interpretasi seperti ini sudah menjadi wacana dominan yang menutup kemungkinan untuk melihat Poso sebelum tahun

1998 atau semasa konflik ini terjadi. Pengalaman peperangan dan kekacauan lebih mendominasi dan tidak mengangkat narasi upaya perdamaian antarumat beragama. Misalnya, tahun 2001 dan 2022, saat konflik kekerasan di Poso terjadi para perempuan Kristen naik truk pertamina di malam hari untuk menerobos lokasi pemeriksaan yang dilakukan atas nama agama. Perempuan itu segera menghampiri saudaranya yang Muslim dan memberitahukan kepada mereka: “besok akan ada penyerangan kalian harus keluar dari desa ini sekarang,” katanya. Keesokan harinya sekelompok orang Kristen datang menyerang kampung kosong. Warga Muslim itu selamat dan mengingat bagaimana perempuan Kristen itu menyelamatkan hidup banyak orang.

Tiga orang ibu berlari ketakutan karena dikejar oleh umat Muslim yang ingin membunuhnya. Mereka mencari tempat untuk bersembunyi di daerah mayoritas Muslim. Ibu-ibu dari masjid yang melihat peristiwa itu segera memanggil mereka untuk bersembunyi di dalam masjid. Ketika para pengejar itu bertanya kepada ibu-ibu yang ada di masjid itu: “Di mana mereka”? Mereka hanya menjawab: “Kami tidak lihat, kalau kami lihat, itu adalah saudara kami,” ujar mereka kepada para pengejar itu. Cerita ini menguatkan alasan banyak keluarga Kristen menjalin hubungan erat dengan orang Muslim.

Dua kisah di atas hanyalah sebagian dari sekian banyak hal serupa seperti itu. Hanya saja pengalaman-pengalaman tersebut dianggap tidak penting, perlahan hilang dan terkubur dengan sendirinya oleh wacana dominan yang ada di Poso. Hal ini terjadi karena ingatan adalah produksi sosial, akan tetapi banyak juga hal yang diproses secara individu. Ingatan bersama sering dianggap puncak dari ingatan-ingatan individu. Ingatan, menurut Maurice Halbwachs bisa menjadi ingatan kolektif jika interpretasi dan ruang komunikasi hanya berada di tangan otoritas hierarki dalam kelompok, agama dan para tua-tua. Hal ini mengakibatkan adanya proses filter dari fragmen-fragmen unik yang terdapat

dalam ingatan individual. Ingatan kolektif menyerap kepelbagaian ingatan individual atau kelompok kecil ke dalam tema ingatan bersama yang lebih besar. Upaya saling melindungi dan menjaga satu sama lain antarumat beragama ditenggelamkan oleh wacana dominan.⁴

Di sini kita diperlihatkan bagaimana peran perempuan mengurai wacana dominan demi proses penguatan bersama dalam suatu gerakan untuk mendapatkan kembali ruang-ruang keterlibatan perempuan dan partisipasi pembangunan.⁵ Bukti upaya transformatif yang dilakukan oleh perempuan adalah berdirinya “Sekolah Perempuan Mosintuwu” sebagai ruang bertemu dan berdialog demi menuju masa depan Poso lebih baik. Kelas Sekolah Perempuan Mosintuwu menjadi mediasi para korban ketertindasan dari umat beragama. Para korban yang ikut dalam kelas dipertemukan untuk saling terbuka, mengaku dan meluapkan kekesalan mereka terhadap umat beragama yang lainnya. Ruang bertemu itu dikelola untuk membicarakan kemarahan dan kebencian secara terbuka agar sampai pada pemahaman bersama tentang situasi yang dihadapi di dalam konflik. Dialog ini membuka pemahaman bahwa tidak ada yang menang atau kalah, yang hanya ada luka dan penderitaan. Percakapan ini dihadiri oleh umat Islam, Kristen, Hindu dan semua suku. Pengalaman negatif membawa mereka untuk membangun pengalaman damai di masa depan.

Setelah melalui proses kelas perdamaian, para perempuan Sekolah Perempuan mendeklarasikan perdamaian dengan melakukan aksi orasi sebagai sikap kritis terhadap situasi di Poso. Aksi ini bukan hanya menggaungkan suara perdamaian, tetapi juga gugatan dari rasa tidak aman yang berangkat dari situasi perang antara polisi dan teroris. Para perempuan ini juga mengadvokasi

⁴ Lian Gogali, “Gerakan Perempuan Poso: Merajut Damai, Membarui Desa, Merawat Bumi,” dalam *Teologi Publik dan Ketidakadilan: Pembebasan Holistik Bagi dan Bersama Para Korban* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2023), 49.

⁵ Gogali, “Gerakan Perempuan Poso”, 53.

para korban yang sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan mereka akibat kekacauan konflik. Mereka memberikan bantuan sementara di beberapa desa dan juga dana BOS menjadi lebih tepat alokasi dananya setelah mendapatkan kritik dari sekolah perempuan.

Perjalanan pengabdian masyarakat terus berlanjut. Sekolah Perempuan memberikan inspirasi transformatif. Kebutuhan sumber alam di Poso yang dipolitisasi membuat warga menderita dan dimiskinkan. Berangkat dari penderitaan itu, masyarakat setempat membuka Sekolah Pembaharu Desa. Sekolah ini memulai kegiatannya dengan mendiskusikan ulang bahasa-bahasa pembangunan dan mendesain ulang langkah-langkah untuk menyusun kemakmuran desa. Demi mencapai kesetaraan dalam kebutuhan, mereka membangun program 'Ekonomi Solidaritas', yakni pengelolaan sumber daya alam yang berbela rasa pada alam dan sesama manusia. Pembangunan ekonomi yang antroposentris yang mengabaikan alam sebagai bagian yang setara dalam ekosistem kehidupan. Program ini membuka keterjalinan antar-umat beragama makin kuat karena dimensi pembebasan merupakan cita-cita bersama.

Dari ketiga tulisan ini, kita bisa melihat beberapa fenomena yang sangat memilukan hati. Pertama kisah dari Surya Samudera Giamsjah, yang memimpin aksi pengharapan masyarakat Semarang untuk memperjuangkan hak dan tanah masyarakat lokal dari korporasi yang bisa merebut hak dan kehidupan rakyat lokal. Ia menegaskan bahwa keugaharian dalam diri seseorang mencerminkan kualitas spiritualitas mereka. Kemudian ada Sugianto yang memiliki peristiwa dan kronologi yang sama dengan Surya, membela hak dan tanah masyarakat lokal dari aktivitas ekspansi industri. Bahkan ketika ditangkap, ia dinasihati oleh seorang pendeta bahwa jangan melakukan hal-hal yang tidak perlu sebagai seorang pendeta, pendeta hanya berfokus pada pelayanan. Selanjutnya ada Lian Gogali yang memperjuangkan

perdamaian dari panasnya konflik yang mengatasnamakan agama. Perjuangan demi kedamaian yang berangkat dari Sekolah Perempuan Masintuwu yang berperan penting dalam mencapai kedamaian dari konflik dan juga adanya Sekolah Pembaharuan Desa demi menjaga keutuhan alam dari intervensi kebijakan pemerintah dan industri. Perjuangan-perjuangan ini mencerminkan figur seorang Yesus Sang transformator dan revolusioner. Perlawanan ini menjadikan contoh dan teladan bahwa pemiskinan dan ketidakadilan merupakan bagian penting dari implementasi iman umat. Resistensi dibutuhkan untuk menghancurkan silent majority dan *status quo* di mana situasi bersama diabaikan. Ketidakadilan merupakan locus berteologi demi mengupayakan dimensi pembebasan holistik bagi dan bersama para korban.

Keadaban Publik dan Pemeliharaan Bumi oleh Zakaria J.

Ngelow

Dalam diskursus teologi kontemporer, Zakaria J. Ngelow menyoroti keterkaitan yang mendalam antara spiritualitas keugaharian, keadaban publik, dan pemeliharaan bumi. Keadaban publik, menurut Ngelow, tidak hanya sekadar mencakup tata krama atau norma sosial yang mengatur interaksi antarindividu dalam masyarakat. Lebih dari itu, ia mengajukan suatu konsep keadaban yang berkaitan erat dengan tanggung jawab moral terhadap bumi dan segala isinya. Dalam pandangannya, keadaban publik adalah wujud dari kepekaan spiritual yang membawa umat manusia untuk melihat bumi dan alam sebagai bagian integral dari kehidupan yang harus dijaga dan dilestarikan.⁶

Ngelow memandang spiritualitas sebagai suatu dimensi yang menghubungkan kehidupan manusia dengan Allah dan ciptaan-Nya. Ia mengusulkan bahwa spiritualitas keugaharian

⁶ Zakaria J. Ngelow, "Keadaban Publik dan Pemeliharaan Bumi" dalam *Teologi Publik dan Ketidakadilan: Pembebasan Holistik Bagi dan Bersama Para Korban* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2023), 80.

harus menggerakkan umat untuk bertindak dengan etos hidup sederhana, adil terhadap sesama dan bumi, tidak hanya dalam konteks kehidupan pribadi, tetapi juga dalam kehidupan sosial dan publik serta peka terhadap kerusakan ekologi. Sebagai contoh, dalam menghadapi bencana ekologis dan perubahan iklim yang semakin mengancam kelangsungan hidup makhluk hidup, Ngelow menyarankan agar spiritualitas keugaharian tidak hanya dipraktikkan dalam ruang ibadah, tetapi harus diekspresikan dalam tindakan kolektif yang memperhatikan pemeliharaan bumi. Pemeliharaan bumi di sini bukanlah sekadar upaya ilmiah atau teknologis, tetapi merupakan tindakan yang dilandasi oleh kesadaran akan tanggung jawab spiritual manusia sebagai pengelola bumi yang diberikan oleh Tuhan.⁷

Salah satu konsep kunci dalam pemikiran Ngelow adalah gagasan mengenai bumi sebagai *sacramentum* Allah. Dalam pandangannya, bumi bukan sekadar objek fisik yang bisa dieksploitasi semauanya, melainkan merupakan tempat suci yang mencerminkan karya Allah. Konsep *sacramentum* dalam teologi mengacu pada sesuatu yang menjadi tanda atau lambang dari kasih karunia Tuhan yang melampaui realitas fisik. Bumi sebagai *sacramentum* Allah menandakan bahwa alam adalah tempat di mana umat manusia dapat mengalami kehadiran Tuhan, bukan hanya dalam pengalaman religius pribadi, tetapi dalam keberadaan materialnya yang penuh dengan makna dan nilai spiritual. Oleh karena itu, merusak bumi sama saja dengan merusak manifestasi kasih Tuhan dalam dunia ini.⁸

Pemeliharaan bumi, menurut Ngelow, harus dipahami sebagai sebuah tanggung jawab moral yang bersifat universal dan tidak terbatas pada kelompok tertentu saja. Dalam konteks ini, pemeliharaan bumi tidak hanya ditujukan untuk generasi yang hidup sekarang, tetapi juga untuk generasi yang akan

⁷ Ngelow, "Keadaban Publik dan Pemeliharaan Bumi," 77-79.

⁸ Ngelow, "Keadaban Publik dan Pemeliharaan Bumi," 85-86.

datang. Dengan demikian, keadaban publik yang dikemukakan Ngelow menjadi sangat relevan dalam upaya-upaya pelestarian lingkungan. Keadaban publik mengajarkan bahwa kebijakan publik yang baik harus memperhatikan keberlanjutan ekosistem dan menghormati hak-hak seluruh makhluk hidup di bumi. Di sinilah letak hubungan antara teologi dan ekologi: agama harus menjadi pendorong perubahan sosial yang peduli terhadap kelestarian bumi.⁹

Seiring dengan konsep keadaban publik, Ngelow juga membahas fenomena bencana ekologis yang semakin meluas di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Bencana ekologis seperti banjir, longsor, dan kekeringan merupakan manifestasi dari kerusakan ekologis yang terjadi akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab. Dalam pandangan Ngelow, bencana ekologis bukanlah sekadar akibat dari faktor alam, tetapi juga merupakan buah dari ketidakadilan struktural yang terjadi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Ekspansi industri yang tidak terkendali, penebangan hutan secara liar, serta konversi lahan untuk pertanian dan pembangunan seringkali mengabaikan dampak ekologisnya. Hal ini, menurut Ngelow, adalah bentuk kegagalan manusia dalam memelihara bumi sebagai *sacramentum* Allah, yang seharusnya dihormati dan dirawat.

Untuk itu, Ngelow mengusulkan agar dalam menghadapi bencana ekologis, umat manusia harus mengembangkan kesadaran ekumenis dan teologis yang berbasis pada penghormatan terhadap ciptaan Tuhan. Dengan kesadaran ini, tindakan untuk merawat bumi akan dilihat sebagai panggilan spiritual yang tidak bisa dipisahkan dari praktik kehidupan sehari-hari. Gereja dan komunitas agama, menurutnya, harus menjadi agen perubahan dalam masyarakat dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadaban yang mendukung kelestarian lingkungan. Ini berarti

⁹ Ngelow, "Keadaban Publik dan Pemeliharaan Bumi," 83-85.

bahwa setiap kebijakan publik, termasuk dalam hal perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam, harus berpijak pada prinsip-prinsip keadaban yang menghormati bumi sebagai bagian dari ciptaan Tuhan.¹⁰

Ngelow menggagas suatu dialog antara teologi dan ekologi yang saling menguatkan. Dalam dialog ini, teologi bukan hanya memberikan perspektif tentang tanggung jawab manusia terhadap ciptaan, tetapi juga membuka ruang untuk pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana manusia dapat hidup selaras dengan alam. Teologi ekosentris, seperti yang diajukan Ngelow, mengajak umat untuk tidak hanya berfokus pada keselamatan individual atau rohaniah, tetapi juga pada keselamatan bumi dan ekosistem yang menopang kehidupan umat manusia. Sejalan dengan itu, ia mengkritik paradigma pembangunan yang lebih mengutamakan keuntungan ekonomi jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan yang lebih luas. Oleh karena itu, dalam konteks keadaban publik, Ngelow mengajak umat manusia untuk berpikir secara holistik dalam setiap kebijakan dan keputusan yang diambil, terutama yang berhubungan dengan eksploitasi sumber daya alam dan penggunaan teknologi. Keputusan-keputusan tersebut harus mempertimbangkan keseimbangan ekosistem serta dampaknya terhadap generasi mendatang.

Ngelow mengingatkan bahwa pemeliharaan bumi bukanlah tugas yang hanya bisa dilakukan oleh segelintir pihak, melainkan merupakan tanggung jawab bersama dari seluruh umat manusia. Dalam hal ini, keadaban publik yang dimaksud bukan hanya untuk memelihara keharmonisan sosial, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan ekologis yang menjadi syarat utama bagi kelangsungan hidup di bumi. Bumi sebagai *sacramentum* Allah harus dihormati dan dirawat dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab. Dalam menghadapi bencana ekologis yang kian

¹⁰ Ngelow, "Keadaban Publik dan Pemeliharaan Bumi," 87.

merajalela, penting bagi umat manusia untuk mengembangkan spiritualitas keugaharian yang tidak hanya menekankan keselamatan individual, tetapi juga keselamatan bumi sebagai ciptaan Tuhan yang harus dilindungi dan dipelihara.¹¹

Teologi Publik dengan Perspektif Pembebasan Holistik oleh *J.B. Banawiratma*

J.B. Banawiratma mengemukakan konsep teologi publik sebagai suatu cabang pemikiran teologis yang terlibat aktif dalam konteks sosial-politik. Teologi publik, menurut Banawiratma, bukanlah sekadar refleksi teologis yang terpisah dari realitas sosial, melainkan sebuah bentuk keterlibatan aktif dalam membangun tatanan sosial yang lebih adil. Banawiratma memahami teologi publik sebagai respons iman terhadap tantangan-tantangan sosial yang nyata, seperti kemiskinan, ketidakadilan ekonomi, dan penindasan sosial. Dalam kerangka ini, teologi publik tidak hanya berbicara tentang aspek rohani atau kehidupan pribadi individu, tetapi juga berbicara tentang bagaimana agama dan kepercayaan dapat memainkan peran dalam merespons dinamika sosial yang menindas.¹² Banawiratma menjelaskan bahwa teologi publik harus memiliki dimensi praktis yang terhubung langsung dengan permasalahan sosial yang ada. Ini berarti teologi harus berbicara dalam konteks dunia nyata, bukan hanya dalam ruang ibadah atau ruang privat individu. Ia berargumen bahwa agama harus menjadi pendorong perubahan sosial yang melawan ketidakadilan struktural, mengatasi kesenjangan sosial, dan memperjuangkan hak-hak mereka yang terpinggirkan. Dalam perspektif ini, teologi publik bukan sekadar diskursus teologis yang terlepas dari kenyataan, melainkan suatu panggilan untuk terlibat dalam

¹¹ Ngelow, "Keadaban Publik dan Pemeliharaan Bumi," 76-88.

¹² J.B. Banawiratma, "Teologi Publik dengan Perspektif Pembebasan Holistik" dalam *Teologi Publik dan Ketidakadilan: Pembebasan Holistik Bagi dan Bersama Para Korban* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2023), 89-92.

tindakan nyata demi menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial.¹³

Banawiratma mengusulkan kerangka analisis sosial struktural multidimensional sebagai alat untuk memahami dan menganalisis ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam kerangka ini, ia menekankan pentingnya memahami ketidakadilan tidak hanya dari satu dimensi, seperti ekonomi atau politik, tetapi sebagai fenomena yang melibatkan berbagai dimensi sosial yang saling berhubungan. Misalnya, ketidakadilan ekonomi tidak hanya berdampak pada distribusi kekayaan, tetapi juga dapat mempengaruhi status sosial, akses terhadap pendidikan, serta hubungan kekuasaan di tingkat lokal dan global. Dalam pandangan Banawiratma, analisis sosial struktural multidimensional ini penting karena membantu mengungkap akar masalah ketidakadilan yang lebih dalam dan kompleks, yang sering kali tidak terlihat hanya dengan melihat satu dimensi masalah secara terpisah.³ Sebagai contoh konkret, Banawiratma menganalisis permasalahan kemiskinan di negara berkembang dengan menggunakan kerangka ini. Ia menunjukkan bahwa kemiskinan bukan hanya akibat dari ketidakadilan ekonomi yang menyebar, tetapi juga berkaitan dengan ketimpangan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan keadilan hukum. Dalam konteks ini, tindakan pembebasan harus melibatkan reformasi di berbagai sektor, bukan hanya pada sektor ekonomi, tetapi juga pada sektor pendidikan, kesehatan, dan sistem hukum. Dengan demikian, kerangka analisis sosial struktural multidimensional memberikan wawasan yang lebih luas dan komprehensif tentang bagaimana berbagai faktor sosial berinteraksi untuk menciptakan ketidakadilan.¹⁴

Banawiratma menggali visi pembebasan holistik melalui refleksi terhadap *Laudato Si'*, Banawiratma menganggap bah-

¹³ Banawiratma, "Teologi Publik," 92-95.

¹⁴ Banawiratma, "Teologi Publik," 95-105.

wa *Laudato Si'*, menawarkan sebuah perspektif yang sangat relevan dalam konteks teologi publik dan pembebasan holistik. Pembebasan holistik yang dimaksudkan Banawiratma mengacu pada pembebasan yang menyentuh seluruh dimensi kehidupan: tidak hanya spiritual, tetapi juga sosial, ekonomi, dan ekologis. *Laudato Si'* mengajarkan bahwa kerusakan lingkungan dan perubahan iklim adalah masalah kemanusiaan yang memerlukan respons bersama dari semua pihak, termasuk komunitas agama, pemerintah, dan masyarakat sipil. Pembebasan tidak hanya berfokus pada pembebasan manusia dari penderitaan sosial dan ekonomi, tetapi juga dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh kerusakan ekologis. Banawiratma memandang **Laudato Si'** sebagai contoh konkret bagaimana teologi publik dapat terlibat dalam mengatasi ketidakadilan ekologis, yang merupakan bagian dari ketidakadilan struktural yang lebih besar.¹⁵

Sebagai contoh konkret dari visi pembebasan holistik, Banawiratma merujuk pada gerakan-gerakan sosial yang menanggapi krisis ekologis dengan pendekatan berbasis agama. Ia menggambarkan bagaimana komunitas keagamaan di berbagai belahan dunia terlibat dalam inisiatif pelestarian lingkungan melalui tindakan kolektif seperti penanaman pohon, pengurangan sampah plastik, dan advokasi kebijakan yang mendukung keberlanjutan ekologis. Dalam konteks ini, pembebasan holistik melibatkan bukan hanya pembebasan manusia dari kemiskinan dan ketidakadilan sosial, tetapi juga dari dampak-dampak destruktif yang ditimbulkan oleh kerusakan lingkungan. Melalui kerangka ini, Banawiratma mengajak umat beragama untuk terlibat dalam pelestarian bumi sebagai bagian dari tugas pembebasan yang lebih luas.¹⁶

Teologi publik yang berbasis pada perspektif pembebasan holistik, menurut Banawiratma, tidak hanya berhenti pada teori

¹⁵ Banawiratma, "Teologi Publik," 106-110.

¹⁶ Banawiratma, "Teologi Publik," 110-112.

atau spekulasi teologis, tetapi harus memberikan kontribusi praktis dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Banawiratma menggambarkan dua contoh konkret mengenai kontribusi praktis dari teologi publik dalam dunia nyata: komunitas perusahaan dan komunitas pasar. Dalam konteks ini, ia mengkritik praktik-praktik ekonomi yang tidak adil, seperti eksploitasi tenaga kerja dan perusakan lingkungan oleh perusahaan-perusahaan besar. Namun, ia juga melihat adanya potensi untuk transformasi melalui pendekatan berbasis etika yang lebih adil dan berkelanjutan. Dalam komunitas perusahaan, Banawiratma mendorong agar prinsip-prinsip teologi pembebasan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan bisnis, sehingga keadilan sosial dan keberlanjutan menjadi bagian integral dari praktik perusahaan.¹⁷

Selanjutnya, Banawiratma membahas komunitas pasar sebagai tempat interaksi ekonomi yang sering kali dipengaruhi oleh ketidakadilan struktural. Ia menekankan pentingnya hadirnya prinsip-prinsip keadilan sosial dalam pasar global, di mana ketimpangan ekonomi sering kali menguntungkan segelintir pihak dan merugikan banyak pihak lainnya. Banawiratma menggagas agar teologi publik, yang mengusung visi pembebasan holistik, dapat memberikan panduan moral dan etis dalam sistem ekonomi. Ini berarti bahwa tindakan-tindakan seperti pembentukan kebijakan perdagangan yang lebih adil, pemberian akses kepada mereka yang terpinggirkan, dan pengurangan ketimpangan sosial-ekonomi harus menjadi bagian dari upaya kolektif dalam mewujudkan masyarakat yang lebih berkeadilan. Dengan demikian, kontribusi praktis dari teologi publik tidak hanya berupa wacana, tetapi juga tindakan nyata yang memengaruhi kehidupan sosial-ekonomi secara signifikan.¹⁸

¹⁷ Banawiratma, "Teologi Publik," 112-113.

¹⁸ Banawiratma, "Teologi Publik," 113-117.

LANDASAN TEOLOGIS PENULIS

Penulis menekankan bahwa solidaritas adalah aspek esensial dalam perjuangan keadilan sosial. Solidaritas tidak hanya sekadar rasa empati, tetapi sebuah komitmen untuk bersama-sama melawan segala bentuk penindasan. Landasan teologisnya dapat ditemukan dalam Amsal 31:8-9, yang menekankan pentingnya berbicara untuk yang tertindas dan memperjuangkan hak mereka. Dalam teologi Kristen, solidaritas mengarah pada penciptaan komunitas yang peduli dan terlibat dalam pembebasan sosial. Melalui solidaritas, kita mencerminkan kasih Kristus yang tidak hanya memperhatikan penderitaan individu, tetapi juga berusaha mengubah struktur ketidakadilan yang ada.

Kehadiran bersama mereka yang tertindas, khususnya petani yang menjadi korban ketidakadilan, mencerminkan panggilan Kristen untuk menjadi saksi hidup bagi penderitaan orang lain. Teologi yang mendasari bab ini berakar pada Matius 25:35-36, yang mengajak umat untuk hadir di tengah-tengah orang yang membutuhkan—baik dalam bentuk fisik maupun emosional. Hadir bersama korban adalah ekspresi nyata dari kasih Tuhan yang membawa pembebasan. Ketakutan terhadap ketidakadilan atau kekuasaan yang menindas tidak boleh menghalangi perjuangan untuk kebenaran, melainkan justru menjadi dorongan untuk berdiri bersama yang tertindas, sebagaimana Kristus hadir di tengah penderitaan umat manusia.

Perempuan, dalam gerakan ini, memainkan peran penting dalam membangun perdamaian dan memperbarui kehidupan komunitas yang rusak. Landasan teologisnya dapat ditemukan dalam Yesaya 1:17, yang menyerukan umat untuk mencari keadilan, menegakkan yang tertindas, dan memperjuangkan hak-hak yang lemah, termasuk perempuan. Dalam teologi pembebasan, peran perempuan tidak hanya sebagai agen perdamaian, tetapi juga sebagai penjaga dan pemelihara kehidupan, baik dalam

konteks sosial maupun ekologis. Teologi publik mengajarkan bahwa perempuan, dengan kelembutan dan keteguhan mereka, memiliki kekuatan untuk merajut kedamaian yang membawa pembaruan bagi masyarakat dan bumi.

Keadaban publik yang mengarah pada pemeliharaan bumi merupakan panggilan bagi umat untuk bertanggung jawab atas alam ciptaan dan memastikan bahwa keadilan sosial tercermin dalam hubungan manusia dengan lingkungan. Kejadian 2:15 mengajarkan bahwa manusia diciptakan untuk mengusahakan dan memelihara bumi, menjadikannya tanggung jawab teologis untuk merawat ciptaan Tuhan. Pembebasan holistik dalam teologi publik mencakup tidak hanya pembebasan manusia dari penindasan sosial, tetapi juga upaya untuk menjaga keseimbangan ekologis, sehingga bumi tetap dapat menopang kehidupan semua makhluk. Pemeliharaan bumi adalah bagian integral dari hidup yang adil dan berkelanjutan.

Teologi publik dengan perspektif pembebasan holistik yang diusung penulis mengajarkan bahwa pembebasan dalam ajaran Kristen tidak hanya mencakup aspek spiritual, tetapi juga sosial, ekonomi, dan ekologis. Lukas 4:18-19 menggambarkan visi Yesus tentang pembebasan yang meliputi keseluruhan dimensi kehidupan umat manusia: dari penderitaan fisik, emosional, hingga ketidakadilan struktural. Pembebasan holistik ini mengajak umat untuk tidak hanya merenungkan keselamatan pribadi, tetapi juga bekerja sama dalam menciptakan dunia yang lebih adil, berperikemanusiaan, dan penuh kasih, sebagaimana Tuhan menghendaki. Pembebasan ini merupakan perjuangan untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua, terutama bagi mereka yang tertindas dan terpinggirkan.

Membangun Landasan Teologis

Solidaritas menjadi salah satu pilar utama dalam landasan teologis buku ini, yang menekankan pentingnya tidak hanya merasa empati terhadap penderitaan orang lain, tetapi juga

bertindak untuk mengubah kondisi tersebut. Teologi yang ditawarkan oleh penulis mengajak umat Kristen untuk tidak bersikap pasif dalam menghadapi ketidakadilan, tetapi untuk terlibat secara aktif dalam perjuangan melawan ketidakadilan sosial. Melalui solidaritas, kita tidak hanya menunjukkan kasih Kristus secara pribadi, tetapi juga mengorganisir upaya kolektif untuk mengubah struktur sosial yang menindas. Dengan kata lain, pembebasan yang dibahas dalam buku ini mengajak umat untuk bersama-sama dengan mereka yang tertindas dalam memperjuangkan hak mereka, meruntuhkan sistem ketidakadilan, dan menciptakan ruang-ruang sosial yang lebih inklusif dan adil bagi semua.

Akhirnya, teologi yang dipaparkan dalam buku ini memperkenalkan sebuah perspektif yang menggabungkan dimensi sosial dengan pemeliharaan lingkungan sebagai bagian dari misi pembebasan. Pemeliharaan bumi bukan hanya kewajiban ekologis, tetapi juga merupakan panggilan teologis yang tidak terpisahkan dari keadilan sosial. Dalam hal ini, teologi publik yang holistik mengajarkan bahwa upaya untuk memperbaiki kondisi sosial harus beriringan dengan kesadaran ekologis, karena keduanya saling terkait dan saling mempengaruhi. Ketidakadilan terhadap lingkungan sama halnya dengan ketidakadilan terhadap sesama, karena kerusakan alam seringkali berdampak paling berat pada mereka yang paling miskin dan terpinggirkan. Dengan demikian, teologi ini mengajarkan pentingnya hidup dalam keseimbangan dengan alam, serta tanggung jawab manusia untuk merawat bumi sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan keadilan dan kedamaian sejati bagi seluruh ciptaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Gogali, Lian. "Gerakan Perempuan Poso: Merajut Damai, Membarui Desa, Merawat Bumi." Dalam *Teologi Publik dan Ketidakadilan: Pembebasan Holistik Bagi dan Bersama Para Korban*, peny. J.B. Banawiratma. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2023.
- Banawiratma, J.B. "Teologi Publik dengan Perspektif Pembebasan Holistik." Dalam *Teologi Publik dan Ketidakadilan: Pembebasan Holistik Bagi dan Bersama Para Korban*, peny. J.B. Banawiratma, 89-92. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2023.
- Ngelow J, Zakaria. "Keadaban Publik dan Pemeliharaan Bumi." Dalam *Teologi Publik dan Ketidakadilan: Pembebasan Holistik Bagi dan Bersama Para Korban*, peny. J.B. Banawiratma. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2023.